

ANALISIS KESIAPAN E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KOTA SORONG

Wa Aulia La Umar

NPP. 32.1122

Asdaf Kota Sorong, Provinsi Papua Barat

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: 32.1122@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Ruth Roselin Erniwaty Nainggolan, SP., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This study is motivated by the absence of specific research on the implementation of e-Government in Sorong City. Although the central government continues to promote digital transformation through the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE), there has been no specific study examining the implementation of e-Government at the local level in Sorong City. This represents a significant gap in both literature and local policy practice. In the field, various challenges still hinder the optimal implementation of e-Government, such as the limited number and capacity of IT experts, budget constraints for digital infrastructure development, and uneven internet connectivity across regions. Furthermore, the fluctuating SPBE index in Sorong City reflects the region's lack of consistent readiness for comprehensive and sustainable e-Government implementation. **Purpose:** The objective of this study is to determine the readiness of e-Government at the Department of Communication and Informatics of Sorong City. **Method:** This study uses a qualitative method with the e-Government readiness theory by Indrajit (2005) as an analytical tool. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and documentation, with informants selected through purposive sampling. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Result:** The results show that the e-Government readiness of the Department of Communication and Informatics of Sorong City is generally adequate for implementation. The six dimensions of readiness have been fulfilled as supporting indicators for e-Government implementation. However, there are still shortcomings in the legal framework, particularly the absence of a Mayor Regulation governing the implementation of SPBE. **Conclusion:** The readiness of e-Government in Sorong City is at a fairly good level. However, to optimize its implementation, the formulation of specific regional policies or regulations regarding SPBE is needed so that its application can be more effective and well-directed.

Keywords: Analysis; Readiness; e-Government

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya kajian khusus mengenai implementasi e-Government di Kota Sorong. Meskipun pemerintah pusat terus mendorong transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),

di Kota Sorong belum terdapat kajian yang secara khusus menelaah implementasi *e-Government* pada tingkat daerah. Hal ini menjadi celah (gap) penting dalam literatur dan praktik kebijakan lokal. Di lapangan, masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat optimalisasi *e-Government*, seperti rendahnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang teknologi informasi, keterbatasan anggaran pengembangan infrastruktur digital, serta jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, nilai indeks SPBE Kota Sorong yang fluktuatif mencerminkan belum optimalnya kesiapan daerah dalam menerapkan *e-Government* secara menyeluruh dan berkelanjutan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori kesiapan *e-Government* dari Indrajit (2005) sebagai alat analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong secara umum telah memadai untuk diterapkan. Enam dimensi kesiapan telah terpenuhi sebagai indikator pendukung implementasi *e-Government*. Namun, masih terdapat kekurangan pada aspek perangkat hukum, khususnya belum tersedianya Peraturan Walikota yang mengatur pelaksanaan SPBE. **Kesimpulan:** Kesiapan *e-Government* di Kota Sorong sudah berada pada tahap yang cukup baik, namun untuk mengoptimalkan penerapannya, diperlukan perumusan kebijakan atau peraturan daerah khusus terkait SPBE agar implementasinya dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Kata kunci: Analisis; Kesiapan; *e-Government*.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, efisien, dan transparan. Konsep *Smart Governance* muncul sebagai respons terhadap tuntutan ini, dengan teknologi informasi sebagai alat utama mewujudkan *good governance* (Darmi, 2016); (Wahyuni et al., 2021).

Sebagai bentuk transformasi digital, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mempercepat birokrasi digital. Kebijakan ini menekankan bahwa seluruh instansi pemerintah wajib mengimplementasikan SPBE untuk membentuk layanan publik yang adaptif dan responsif. Namun, banyak daerah menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan kepemimpinan digital yang lemah (Suryatman et al., 2024).

SPBE secara langsung terkait dengan e-Government, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas sektor publik (Akbar et al., 2022). Layanan *e-Government* mencakup interaksi pemerintah dengan masyarakat (G2C), antarinstansi (G2G), dan dengan pelaku usaha (G2B) (Shafira, A., & Kurniasiwati, 2021). Keberhasilan implementasinya dipengaruhi oleh kepercayaan dan kemudahan sistem digital pemerintah, terutama dalam situasi krisis (Iqbal & Fridayani, 2022).

Selain aspek teknologi, *smart governance* juga menekankan kolaborasi antarlembaga, manfaat sosial, dan kesiapan politik (Susanto, 2019). Presiden RI bahkan menegaskan bahwa sistem digital harus mempermudah pelayanan, dengan indikator keberhasilan mencakup kepuasan, manfaat, dan kemudahan bagi masyarakat (Menpan, 2023). Meski begitu, penggunaan teknologi global seperti SaaS masih menimbulkan tantangan, termasuk risiko lock-in, kurangnya interoperabilitas, dan

masalah lintas yurisdiksi yang memengaruhi keterbukaan dan perlindungan data (Lundell et al., 2022). Interoperabilitas pun menjadi elemen penting untuk pertukaran data antarlembaga pemerintahan yang terbuka dan konsisten (Akbar et al., 2022). Sementara itu, teknologi blockchain meskipun menjanjikan transparansi dan efisiensi, belum banyak diadopsi di negara berkembang karena kompleksitas sistem, keterbatasan SDM, dan belum adanya tata kelola yang sesuai (Reyan M. Zein Hossana Twinomurini, 2023).

Evaluasi kesiapan e-Government dapat menggunakan pendekatan *pillar*, yang meliputi penyebaran informasi, komunikasi, transaksi, interoperabilitas, dan partisipasi publik, dan dianggap lebih komprehensif dibanding pendekatan bertahap (Nangameka, 2022).

Pemerintah Kota Sorong merupakan salah satu daerah yang telah mengupayakan Pemerintah Kota Sorong merupakan salah satu daerah yang telah mengupayakan penerapan SPBE sejak diterbitkannya Perpres No. 95 Tahun 2018. Namun, data evaluasi Kemenpan RB menunjukkan bahwa indeks SPBE Kota Sorong dari tahun 2018–2023 berada pada kategori “kurang”, bahkan sempat menurun drastis pada tahun 2021 dari skor 1,41 menjadi 1,03.a.

Tabel 1. Indeks SPBE Tahun 2018-2023 Kota Sorong

Tahun	Indeks	Predikat
2018	1,41	Kurang
2019	1,41	Kurang
2020	1,41	Kurang
2021	1,03	Kurang
2022	1,75	Kurang
2023	1,72	Kurang

Sumber: Hasil evaluasi indeks SPBE oleh Kemenpan RB, diolah penulis 2024

Menariknya, pada 2021 Kota Sorong mendapat nilai tinggi dari Ombudsman RI (81,60) dan masuk zona hijau dalam pelayanan publik (Ombudsman Republik Indonesia, 2022), setelah sebelumnya berada di zona merah pada periode 2015–2019. Hal ini menunjukkan perbaikan administratif, namun tidak seiring dengan kesiapan infrastruktur dan sistem digital.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sorong sebagai pelaksana SPBE, sebagaimana diatur dalam Perda Kota Sorong No. 8 Tahun 2017, masih menghadapi tantangan seperti minimnya SDM ahli, keterbatasan anggaran, buruknya infrastruktur jaringan, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi kesiapan kelembagaan dalam penerapan e-Government. Mengingat belum adanya studi yang meneliti secara spesifik kesiapan SPBE di Kota Sorong, maka kajian ini menjadi penting dan relevan. Penelitian ini menggunakan teori *E-Government Readiness* dari (Indrajit et al., 2004) sebagai kerangka evaluasi terhadap kesiapan Diskominfo Kota Sorong dalam pelaksanaan *e-Government*.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penulis memfokuskan penelitian pada rendahnya tingkat kesiapan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sorong dalam melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mendorong transformasi digital sebagai bagian penting dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kota Sorong sendiri telah masuk dalam zona hijau (tingkat kepatuhan tinggi) dalam pelayanan publik berdasarkan penilaian Ombudsman RI tahun 2021. Namun, capaian indeks SPBE Kota Sorong dari tahun 2018 hingga 2023 justru menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun, dengan skor terendah pada tahun 2021 yakni 1,03 (Kemenpan RB, 2023). Hal ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan administratif dalam pelayanan publik dengan kesiapan infrastruktur dan sistem digital yang menjadi fondasi utama SPBE.

Beberapa permasalahan mendasar yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan SPBE di Kota Sorong adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi informasi, keterbatasan anggaran, buruknya kualitas infrastruktur jaringan, dan lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Padahal, keberhasilan SPBE sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan dan kolaborasi lintas sektoral dalam membangun sistem informasi pemerintahan yang terpadu (Indrajit et al., 2004).

Selain itu, literatur dan penelitian sebelumnya lebih banyak membahas implementasi SPBE di tingkat pusat atau di kota-kota besar, sementara kajian empiris yang mendalam tentang kesiapan pemerintah daerah, khususnya di wilayah Indonesia Timur seperti Kota Sorong, masih sangat terbatas. Padahal, konteks geografis, sosial, dan kapasitas kelembagaan di wilayah ini sangat berbeda dan menuntut pendekatan yang khas dan kontekstual.

Kesenjangan inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan, yaitu untuk mengevaluasi dan menganalisis sejauh mana kesiapan Diskominfo Kota Sorong dalam menjalankan amanat SPBE, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang perlu dibenahi agar transformasi digital pemerintahan di daerah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji implementasi *e-government* dan kesiapan kelembagaan pemerintah daerah dalam menyukseskan transformasi digital pelayanan publik. Penelitian-penelitian ini memberikan landasan teoritis dan empiris dalam menganalisis efektivitas kelembagaan Pemerintah Kota Sorong dalam pelaksanaan kebijakan *e-government*.

Penelitian Rossi Adi Nugroho dan Yuyun Purbokusumo (2020) dalam artikel berjudul “*E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia*” mengkaji kesiapan lembaga pusat, khususnya Kementerian Kominfo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun skor *e-readiness* Indonesia cukup baik (46,52), kelembagaan masih menjadi kendala utama dalam implementasi *e-government* secara efektif (Nugroho & Purbokusumo, 2020).

Penelitian Marudur Pandapotan (Damanik & Purwaningsih, 2018) dalam “*Kesiapan E-Government Pemerintah Daerah Menuju Pengembangan Smart Province*” menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menghadapi tantangan dalam hal sarana prasarana dan SDM untuk mendukung program *e-government*. Penelitian ini relevan karena menyoroti peran penting kesiapan kelembagaan dalam mendukung agenda digitalisasi pemerintahan daerah.

Penelitian (Nugraha, 2020) berjudul “*Implementasi Kebijakan E-Government dalam Mewujudkan Smart Governance pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung*” menyoroti bahwa meskipun implementasi kebijakan *e-government* berjalan, sarana pendukung dan koordinasi kelembagaan belum optimal, yang menghambat tercapainya tata kelola pemerintahan cerdas secara menyeluruh.

(Maris et al., 2023) dalam penelitian “*Analisis Kesiapan Pemerintahan Kota Prabumulih Dalam Implementasi E-Government Menggunakan Metode Technology Readiness Index (TRI)*” menunjukkan bahwa secara teknologi, instansi pemerintah telah siap, tetapi kesiapan ini belum sepenuhnya diiringi dengan kesiapan kelembagaan secara strategis.

Penelitian (Dionisia Mariani et al., 2020) dalam “*Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Manggarai Dalam Menerapkan E-Government*” menemukan bahwa rendahnya kesiapan kelembagaan seperti kurangnya kerangka hukum, anggaran terbatas, dan lemahnya komitmen pemerintah daerah menjadi hambatan utama penerapan *e-government* yang efektif.

Penelitian dari sivitas akademika IPDN juga memperkaya kerangka analisis ini. Dalam artikel “Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi” oleh (Mariana, 2017) yang dipublikasikan di *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, disoroti bahwa keberhasilan reformasi birokrasi digital memerlukan transformasi budaya kerja dan tata kelola kelembagaan yang adaptif terhadap teknologi.

Demikian pula, dalam kajian yang dilakukan oleh (Wahyudin, 2023) dalam *Jurnal Governansi*, dijelaskan bahwa pelaksanaan *e-government* bukan hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga efektivitas koordinasi antarinstansi, regulasi yang mendukung, serta kompetensi sumber daya manusia di birokrasi daerah.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, terdapat celah penting untuk dikaji, khususnya bagaimana efektivitas kelembagaan Pemerintah Kota Sorong sebagai aktor pelaksana kebijakan *e-government*. Hal ini belum banyak diteliti secara mendalam, padahal sangat penting untuk memastikan implementasi digitalisasi layanan publik berjalan optimal di daerah berkembang seperti Kota Sorong

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu yang lebih banyak menitikberatkan pada aspek kesiapan teknologi dan sumber daya manusia dalam implementasi *e-government* di tingkat pusat maupun daerah lain. Penelitian ini secara khusus mengkaji efektivitas kelembagaan Pemerintah Kota Sorong dalam pelaksanaan kebijakan *e-government*, sebuah fokus yang masih jarang diteliti secara mendalam, terutama di konteks daerah berkembang dan non-metropolitan seperti Kota Sorong. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif secara terpadu untuk mengukur dimensi kelembagaan, mulai dari aspek regulasi, koordinasi antar unit kerja, komitmen pemangku kepentingan, hingga dukungan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak mengandalkan metode evaluasi readiness (kesiapan) berbasis teknologi atau survei persepsi semata, seperti yang digunakan oleh (Nugroho & Purbokusumo, 2020), serta (Maris et al., 2023). Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang bagaimana kelembagaan dapat mendukung atau menghambat implementasi kebijakan *e-government* di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian ilmiah terkait kelembagaan di Pemerintah Kota Sorong, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis berbasis bukti yang dapat menjadi acuan bagi penguatan institusi pemerintah dalam menjalankan transformasi digital pelayanan publik secara efektif dan berkelanjutan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas kelembagaan Pemerintah Kota Sorong dalam pelaksanaan kebijakan *e-government*, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam implementasinya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk menjelaskan dan mengungkap fenomena implementasi *Smart Governance* di Pemerintah Kota Sorong secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi masalah, mencari solusi, serta memahami realitas sosial melalui data yang dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data

primer yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipasi moderat, dan dokumentasi. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap yang bersumber dari literatur, dokumen kebijakan, dan artikel jurnal terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu sebanyak 20 orang yang terdiri dari pejabat struktural di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong serta pegawai yang memiliki peran langsung dalam pelaksanaan *Smart Governance*. Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan pertanyaan terbuka sesuai konteks, observasi partisipasi moderat, serta dokumentasi pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tiga tahap utama: reduksi data untuk menyederhanakan dan memfokuskan data menjadi inti informasi; penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis; dan penarikan kesimpulan yang berdasarkan verifikasi dan validasi data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kesiapan *e-government* dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong berdasarkan teori dari Indrajit (2005), yang menyatakan bahwa kesiapan *e-government* dapat dilihat dari enam dimensi, yaitu: Infrastruktur Telekomunikasi, Tingkat Konektivitas dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) oleh Pemerintah, Kesiapan Sumber Daya Manusia, Ketersediaan Anggaran, Perangkat Hukum, dan Perubahan Paradigma. Selanjutnya, pembahasan dalam konteks SPBE disusun dalam dimensi Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan.

3.1 Hasil Penelitian Kesiapan *E-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong

Penelitian ini mengukur kesiapan *e-government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong berdasarkan enam dimensi dari (Indrajit et al., 2004): infrastruktur telekomunikasi, konektivitas TI, SDM, anggaran, perangkat hukum, dan perubahan paradigma.

1. Infrastruktur Telekomunikasi

Infrastruktur telekomunikasi merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan implementasi *e-government*. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, Diskominfo Kota Sorong telah memiliki jaringan LAN dan Wi-Fi yang tersedia di seluruh ruangan serta perangkat komputer yang mendukung pelaksanaan tugas.

Tabel 1.
Infrastruktur Pendukung E-Government di Diskominfo Kota Sorong

Jenis Infrastruktur	Ketersediaan	Keterangan
Komputer untuk keperluan dinas	Tersedia di setiap ruangan kerja	3 unit digunakan secara khusus untuk <i>e-government</i>
Jaringan LAN dan Wi-Fi	Tersedia di seluruh bagian ruangan	Digunakan untuk koneksi jaringan internal dan eksternal
Ruang podcast	Tersedia	Digunakan untuk penyebaran informasi kepada masyarakat

Sumber: Hasil temuan, diolah penulis 2025

Berdasarkan observasi, ketiga unit komputer khusus tersebut digunakan untuk pelayanan publik daring, pengelolaan arsip digital, dan pengawasan jaringan internal. Namun, secara umum, pengelolaan infrastruktur masih bercampur dengan penggunaan operasional biasa dan belum terintegrasi secara eksklusif untuk sistem e-government.

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Sekretaris Diskominfo Kota Sorong yang menyatakan:

“Komputer yang digunakan pada Diskominfo Kota Sorong telah memenuhi standar yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan e-government, seperti pengembangan aplikasi dan pengolahan data. Namun hanya tiga unit yang digunakan secara khusus untuk menjalankan sistem e-government.”

2. Tingkat Konektivitas dan Pemanfaatan TI oleh Pemerintah

Diskominfo Kota Sorong telah berupaya membangun dan mengintegrasikan berbagai sistem informasi layanan publik melalui platform digital. Salah satu langkah konkret adalah pengembangan website resmi pemerintah Kota Sorong (sorongkota.go.id) yang menjadi pintu masuk ke berbagai subdomain layanan daring

Tabel 2.

Layanan Digital pada Website Pemerintah Kota Sorong

Nama Aplikasi/Subdomain	Fungsi Utama	Status Pemanfaatan
SiCantik	Pelayanan perizinan online	Aktif
JDIH	Jaringan dokumentasi hukum	Aktif
SRIKANDI	Surat elektronik	Terbatas
RKBMD	Aset dan barang milik daerah	Aktif
SaDengKoi	Evaluasi kinerja organisasi	Aktif

Sumber: Hasil temuan, diolah penulis 2025

Aplikasi dan layanan ini sebagian besar dikelola secara terpusat oleh Diskominfo dan digunakan oleh beberapa perangkat daerah. Namun berdasarkan evaluasi, beberapa perangkat daerah masih belum optimal dalam memanfaatkan teknologi ini dalam tata kelola internal mereka.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika:

“Website utama kami adalah sorongkota.go.id. Di dalamnya terdapat berbagai layanan yang telah kami integrasikan seperti SIMBG, JDIH, dan layanan sosial seperti SIKS-NG. Platform ini kami bangun secara bertahap sesuai kemampuan dan kebutuhan.”

Namun, dalam dokumen LAKIP Diskominfo Kota Sorong 2023 disebutkan bahwa pembangunan website belum berjalan maksimal. Hal ini menunjukkan adanya gap antara ketersediaan platform dan pemanfaatan aktual oleh perangkat daerah dan masyarakat

3. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan komponen penting dalam menentukan keberhasilan implementasi *e-government*. Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa ASN di Diskominfo Kota Sorong memiliki latar pendidikan dan keahlian yang cukup memadai. Sebagian besar pegawai merupakan lulusan sarjana dan telah mengikuti pelatihan teknis yang relevan.

Tabel 3.

Komposisi Pendidikan ASN Diskominfo Kota Sorong

Tingkat Pendidikan	Jumlah / Status	Keterangan
SLTA	Ada	Bertugas di bidang Teknologi Informasi dan Persandian
D4/S1	Mayoritas ASN	Terdistribusi di seluruh bidang
S2	Ada	Menjabat di posisi strategis
Pelatihan SPBE	Diikuti beberapa ASN	Pelatihan arsitektur SPBE, bimtek sertifikat elektronik

Sumber: Hasil wawancara, diolah penulis 2025

Dalam wawancara, Sekretaris Dinas menyampaikan:

“SDM yang ada di Diskominfo Kota Sorong secara keseluruhan telah memiliki pendidikan yang memadai. Walaupun terdapat pegawai yang berlatar belakang pendidikan SLTA, mereka memiliki kompetensi teknis yang baik.”

Sementara itu, Kabid Aplikasi dan Telematika menambahkan:

“Tahun lalu kami membuat bimtek sertifikat elektronik dan mengirim pegawai ke Jakarta dan Surabaya. Tahun ini akan dilakukan bimtek Sistem Informasi Arsitektur SPBE.”

4. Ketersediaan Anggaran

Anggaran merupakan dimensi penting dalam kesiapan *e-government* karena menjadi penopang keberlangsungan program digitalisasi. Ketersediaan anggaran yang cukup memungkinkan instansi untuk mengembangkan infrastruktur, aplikasi layanan, pelatihan SDM, serta operasional teknis lainnya. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan LAKIP Diskominfo Kota Sorong tahun 2023, anggaran *e-government* dialokasikan dalam tiga kelompok besar: pemeliharaan peralatan TI, pengembangan aplikasi, dan operasional layanan TI. Berikut data realisasinya:

Tabel 4.

Realisasi Anggaran Diskominfo Tahun 2023

Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Keterangan
Pemeliharaan Peralatan	38.840.000	100%	Perangkat keras dan jaringan
Pengembangan Aplikasi	873.564.500	83,92%	Termasuk pengembangan subdomain
Operasional	407.706.000	100%	Layanan publik dan

Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Keterangan
Pelayanan			pengelolaan website

Sumber: LAKIP Diskominfo Kota Sorong 2023

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa dua komponen anggaran direalisasikan secara penuh, menunjukkan efisiensi dan keseriusan dalam pelaksanaan program. Sementara pengembangan aplikasi memiliki realisasi 83,92%, yang masih tergolong tinggi.

Realisasi ini menunjukkan bahwa anggaran untuk *e-government* tidak hanya tersedia, tetapi juga dimanfaatkan secara optimal. Namun, dalam konteks kelangsungan program, perencanaan anggaran tahunan tetap perlu diselaraskan dengan kebutuhan teknis dan pengembangan inovasi ke depan.

Temuan ini diperkuat oleh keterangan dari Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika yang menyampaikan bahwa:

“Kami memanfaatkan teknologi open-source, solusi cloud, dan meningkatkan kapasitas SDM internal agar tidak bergantung ke pihak ketiga. Evaluasi dilakukan agar anggaran digunakan optimal.”

5. Perangkat Hukum

Perangkat hukum menjadi landasan legal dan kebijakan formal bagi pelaksanaan *e-government* dan SPBE. Tanpa regulasi yang jelas, pelaksanaan sistem elektronik dapat mengalami hambatan koordinasi dan kelemahan legitimasi dalam lintas perangkat daerah. Berdasarkan hasil dokumentasi, Diskominfo Kota Sorong telah mengacu pada beberapa regulasi nasional dalam menyelenggarakan SPBE, yaitu:

Tabel 5.
Regulasi yang Digunakan Diskominfo Kota Sorong

Regulasi	Status Penggunaan	Keterangan
Perpres No. 95 Tahun 2018	Digunakan sebagai acuan	Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Inpres No. 3 Tahun 2003	Digunakan sebagai dasar strategi	Tentang Strategi Nasional <i>E-Government</i>
SK Tim Koordinasi SPBE	Telah dibentuk	Sebagai dasar koordinasi internal
Peraturan Wali Kota tentang SPBE	Belum tersedia	Masih dalam proses usulan

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Diskominfo telah mematuhi regulasi nasional, namun belum memiliki regulasi lokal yang dapat memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat pada level kota. Kekosongan ini dapat membatasi ruang gerak koordinatif antarlembaga, terutama dalam aspek pemaksaan penggunaan sistem daring secara menyeluruh.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika dalam wawancara:

“Sementara yang kami gunakan hanya SK Tim koordinasi. Kami sudah usulkan Peraturan Wali Kota, namun belum ditandatangani karena perlu dorongan dari pimpinan.”

6. Perubahan Paradigma

Perubahan paradigma merupakan dimensi nonteknis namun sangat penting dalam kesiapan *e-government*. Paradigma ini mencakup pola pikir, cara kerja, sikap, perilaku, dan kebiasaan pegawai dalam mengadopsi sistem digital sebagai bagian dari budaya kerja. Berdasarkan observasi dan wawancara, terjadi transformasi sikap pegawai Diskominfo ke arah digitalisasi yang lebih progresif. Pegawai mulai meninggalkan pola kerja manual dan lebih terbiasa menggunakan perangkat lunak, aplikasi, dan komunikasi daring dalam menjalankan tugas harian

Tabel 6.
Dimensi Perubahan Paradigma Pegawai Diskominfo

Aspek yang Berubah	Indikator Perubahan
Cara berpikir	Lebih terbuka terhadap teknologi dan inovasi digital
Cara kerja	Beralih dari manual ke sistem berbasis elektronik
Sikap kerja	Responsif, cepat tanggap, dan proaktif
Perilaku	Disiplin dalam input data dan pengelolaan dokumen daring
Kebiasaan sehari-hari	Minim penggunaan kertas dan peningkatan literasi TI

Sumber: Hasil wawancara, diolah penulis 2025

Perubahan ini bukan hanya hasil dari pelatihan formal, tetapi juga karena tuntutan sistem dan arahan kebijakan organisasi. Namun, perubahan belum sepenuhnya merata di seluruh lini, terutama pada pegawai senior yang masih cenderung mempertahankan cara kerja konvensional.

Konfirmasi terhadap perubahan paradigma ini dijelaskan dalam wawancara oleh Abraham Leisubun (pegawai honorer) yang menyampaikan bahwa:

“Sekarang koordinasi antarpegawai lebih mudah dan sistem kerja lebih transparan. Kami jadi lebih cepat menyesuaikan diri.”

3.2 Pembahasan Analisis SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong

1. Kebijakan SPBE

Dimensi kebijakan SPBE berhubungan dengan regulasi dan arah kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam konteks Diskominfo Kota Sorong, pelaksanaan SPBE telah mengacu pada:

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Surat Keputusan Tim Koordinasi SPBE, yang berfungsi sebagai dasar pembentukan struktur pengelola SPBE di tingkat kota

Meski demikian, berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara, Peraturan Wali Kota tentang SPBE belum tersedia, meskipun usulan Perwal telah disiapkan oleh Diskominfo sebagai bentuk kesiapan kelembagaan. Ketiadaan Perwal ini berdampak pada belum adanya payung

hukum yang mengikat bagi perangkat daerah lain untuk secara konsisten mengimplementasikan SPBE.

Hal ini dijelaskan oleh Kabid Aplikasi dan Telematika:

“Sementara yang kami gunakan hanya SK Tim koordinasi. Peraturan Walikota sudah kami susun dan usulkan, tinggal dorongan dari pimpinan untuk disahkan.”

Analisis: Diskominfo telah menunjukkan kesadaran dan inisiatif untuk mematuhi kebijakan nasional terkait SPBE. Namun, belum adanya regulasi daerah yang mengikat menjadikan pelaksanaan SPBE di Kota Sorong belum memiliki kekuatan hukum penuh di tingkat lokal. Oleh karena itu, percepatan pengesahan Peraturan Wali Kota sangat penting untuk memperkuat integrasi kebijakan lintas OPD dan menjamin keberlangsungan transformasi digital pemerintahan.

2. Tata Kelola SPBE

Dimensi tata kelola SPBE menekankan pentingnya struktur koordinasi, peran lembaga, dan hubungan antarunit kerja dalam menyelenggarakan layanan digital yang terintegrasi. Sebagai instansi pengampu SPBE, Diskominfo Kota Sorong telah:

- Membentuk **Tim Koordinasi SPBE** melalui SK Wali Kota
- Melakukan **koordinasi antarbidang** secara internal
- Menyediakan **fasilitas jaringan LAN dan Wi-Fi** untuk seluruh unit di lingkungan Diskominfo

Upaya ini menunjukkan adanya struktur internal yang mendukung pelaksanaan SPBE. Namun demikian, dari hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa pelaksanaan SPBE **belum terintegrasi secara menyeluruh** dengan perangkat daerah lainnya. Beberapa OPD belum secara konsisten menggunakan sistem informasi digital yang telah dibangun oleh Diskominfo, sehingga masih terjadi dualisme antara sistem manual dan sistem elektronik.

Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Diskominfo:

“Kami masih tahap mendorong OPD lain agar ikut integrasi. Beberapa sudah berjalan, tapi belum semua.”

Analisis: Tata kelola SPBE internal Diskominfo telah berjalan dengan baik dan menunjukkan komitmen terhadap digitalisasi birokrasi. Namun, pelaksanaan SPBE lintas-OPD masih menghadapi tantangan koordinatif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan forum koordinasi reguler, sistem insentif implementasi SPBE antar-OPD, serta peraturan yang dapat memaksa semua instansi mengikuti arah kebijakan digital bersama.

3. Manajemen SPBE

Dimensi manajemen SPBE mencakup pengelolaan SDM, anggaran, dan infrastruktur teknologi sebagai pilar teknis pelaksanaan sistem pemerintahan digital.

a. SDM

SDM di Diskominfo terdiri dari ASN dengan pendidikan beragam, mulai dari SLTA hingga S2. Sebagian besar pegawai telah mengikuti pelatihan SPBE, seperti bimtek sertifikat elektronik serta workshop arsitektur SPBE yang difasilitasi oleh Kemenpan-RB. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kompetensi, pegawai telah dibekali dengan kemampuan yang relevan.

“Tahun lalu kami membuat bimtek sertifikat elektronik dan mengirim pegawai ke Jakarta dan Surabaya. Tahun ini akan dilakukan bimtek Sistem Informasi Arsitektur SPBE,” —Kabid Aplikasi dan Telematika.

b. Anggaran

Tahun 2023, Diskominfo mengalokasikan anggaran SPBE pada tiga komponen utama: pemeliharaan peralatan, pengembangan sistem, dan operasional layanan TI. Data realisasi anggaran menunjukkan pemanfaatan anggaran yang cukup efisien. Data pada Tabel 4 sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran SPBE sudah cukup optimal, terutama dalam mendukung keberlanjutan layanan dan pengembangan sistem. Meskipun realisasi pengembangan belum mencapai 100%, persentasenya masih tergolong tinggi.

c. Infrastruktur

Diskominfo memiliki jaringan LAN dan Wi-Fi di seluruh ruangan, tiga unit komputer yang mendukung operasional e-government, satu server internal, serta satu ruang podcast sebagai media komunikasi digital. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam kelengkapan peralatan pendukung produksi konten digital dan kapasitas sistem.

Analisis: Dari sisi manajemen, Diskominfo Kota Sorong telah menunjukkan kapasitas kelembagaan yang baik dalam pengelolaan SDM, anggaran, dan sarana TI. Tantangan ke depan terletak pada pembentukan sistem monitoring kompetensi digital berbasis kinerja dan peningkatan infrastruktur khusus untuk layanan digital publik, termasuk ruang kolaborasi dan keamanan siber.

4. Layanan SPBE

Dimensi layanan SPBE mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik berbasis elektronik yang mudah diakses, terintegrasi, dan efisien.

Diskominfo telah mengembangkan layanan digital yang terpusat dalam situs resmi sorongkota.go.id, dan beberapa subdomain layanan daring yang meliputi:

- **SiCantik** – Perizinan online
- **JDIH** – Dokumentasi hukum daerah
- **RKBMD** – Pengelolaan aset/barang milik daerah
- **SaDengKoi** – Evaluasi dan pemantauan kinerja OPD

Meski layanan telah berjalan, namun tingkat pemanfaatan oleh masyarakat masih terbatas, dan belum semua OPD secara konsisten menggunakan layanan digital yang tersedia. Beberapa perangkat daerah masih menjalankan proses pelayanan secara manual, dan masyarakat belum sepenuhnya terbiasa mengakses layanan daring.

“Website utama kami adalah sorongkota.go.id. Di dalamnya terdapat berbagai layanan yang telah kami integrasikan seperti SIMBG, JDIH, dan layanan sosial seperti SIKS-NG,” —Kabid Aplikasi dan Telematika.

Analisis: Diskominfo telah berhasil membangun infrastruktur layanan digital secara bertahap. Namun untuk meningkatkan efektivitas layanan SPBE, perlu adanya edukasi publik mengenai cara penggunaan layanan, peningkatan kualitas antarmuka pengguna (*user interface*), dan

integrasi data lintas aplikasi agar pelayanan publik lebih terukur, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa kesiapan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tergolong cukup baik pada aspek manajemen sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, serta pemanfaatan infrastruktur teknologi. Namun, masih ditemukan kelemahan pada dimensi kebijakan lokal yang belum mendukung secara penuh, serta keterbatasan koordinasi lintas-perangkat daerah, khususnya dalam integrasi sistem dan pemanfaatan layanan digital.

Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi SPBE membutuhkan bukan hanya kesiapan teknis, tetapi juga dukungan kelembagaan, regulasi lokal, dan budaya digital yang kuat. Dalam hal ini, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Nugroho & Purbokusumo, 2020) yang menyatakan bahwa *e-readiness* pemerintah Indonesia masih terkendala pada aspek kelembagaan. Penelitian tersebut menyoroti bahwa meskipun nilai kesiapan cukup baik, kelembagaan yang lemah menjadi hambatan utama dalam penerapan *e-government* secara optimal. Hal ini sejalan dengan kondisi di Kota Sorong, di mana belum adanya Peraturan Wali Kota tentang SPBE menjadi titik lemah dalam dukungan kelembagaan lokal.

Lebih lanjut, temuan ini juga mendukung hasil penelitian (Damanik & Purwaningsih, 2018) yang memetakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Smart Province. Dalam konteks tersebut, meskipun ada peluang pengembangan, tantangan kelembagaan dan keterbatasan sinergi antarinstansi juga menjadi sorotan penting. Pola ini juga terlihat di Kota Sorong, di mana infrastruktur sudah mulai dibangun namun belum sepenuhnya digunakan oleh semua OPD.

Sementara itu, dari sisi manajerial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran SPBE di Diskominfo Kota Sorong cukup efisien, dengan realisasi dua dari tiga komponen mencapai 100%. Hal ini berbeda dengan temuan (Nugraha, 2020) yang mengkaji Dinas Kominfo Kota Bandung. Dalam studinya, ditemukan bahwa sarana dan prasarana belum memadai dan implementasi *e-government* belum menyentuh semua aspek keberhasilan. Kondisi Kota Sorong menunjukkan progres yang lebih baik, khususnya dalam penggunaan anggaran dan pelatihan SDM.

Dari pendekatan pengukuran kesiapan teknologi, temuan penelitian ini juga bersinggungan dengan hasil penelitian (Maris et al., 2023) yang menggunakan metode *Technology Readiness Index (TRI)* untuk mengevaluasi kesiapan Pemerintah Kota Prabumulih. Dalam studi tersebut, variabel seperti optimism dan innovativeness menunjukkan kesiapan yang tinggi. Hal yang serupa terjadi di Diskominfo Kota Sorong, di mana sebagian besar pegawai telah mengikuti pelatihan SPBE dan menunjukkan antusiasme dalam adaptasi teknologi, meskipun belum semua staf memiliki kompetensi digital yang merata.

Berbeda dengan kondisi tersebut, hasil penelitian ini juga mempertegas temuan dari (Dionisia Mariani et al., 2020) yang menyatakan bahwa rendahnya kesiapan *e-government* di Kabupaten Manggarai disebabkan oleh absennya kerangka hukum, kurangnya komitmen pimpinan, dan minimnya anggaran serta sarana pendukung. Kota Sorong relatif lebih siap dari sisi anggaran dan

infrastruktur, namun tetap menghadapi tantangan pada aspek regulasi lokal dan integrasi antarinstansi.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat bahwa keberhasilan SPBE sangat dipengaruhi oleh dukungan regulasi, kapasitas kelembagaan, kesiapan teknis, dan manajemen perubahan budaya kerja. Selain menegaskan hasil-hasil sebelumnya, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam hal pemotretan empiris kesiapan SPBE di daerah dengan konteks geografis dan fiskal yang berbeda yakni kawasan Indonesia Timur yang sering kali menghadapi ketimpangan dalam transformasi digital nasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan SPBE di Kota Sorong tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan teknologi atau tersedianya sistem, tetapi juga oleh faktor koordinasi lintas OPD, keberadaan regulasi yang mengikat, serta respons dan adaptasi pengguna terhadap perubahan sistem kerja digital. Oleh karena itu, temuan ini dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi penguatan SPBE, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari aspek regulatif, kelembagaan, dan sosialisasi budaya digital kepada semua pemangku kepentingan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa kesiapan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berada dalam kategori cukup siap, khususnya pada aspek manajemen sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dan pemanfaatan anggaran. Hal ini ditunjukkan oleh ketersediaan jaringan LAN dan Wi-Fi di seluruh ruangan, tersedianya komputer dan server yang mendukung sistem digital, serta realisasi anggaran SPBE yang mencapai lebih dari 83% pada komponen pengembangan sistem dan 100% pada pemeliharaan serta operasional layanan. Dari keempat dimensi yang dianalisis kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan dimensi manajemen menjadi yang paling siap, didukung oleh kompetensi pegawai dan pelatihan berkelanjutan yang telah diikuti. Dimensi kebijakan menjadi yang paling lemah, ditandai dengan belum adanya Peraturan Wali Kota tentang SPBE yang seharusnya menjadi dasar hukum pelaksanaan lintas perangkat daerah. Selain itu, pada dimensi tata kelola dan layanan, ditemukan bahwa integrasi dan adopsi SPBE belum merata di semua OPD, serta pemanfaatan layanan daring oleh masyarakat masih terbatas. Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi SPBE tidak cukup hanya dengan menyediakan infrastruktur dan sistem, tetapi juga membutuhkan penguatan kelembagaan, dukungan kebijakan lokal, serta sinergi antarinstansi dan peningkatan literasi digital. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai kesiapan SPBE di daerah, terutama dalam konteks kota di wilayah Indonesia Timur, dan dapat dijadikan rujukan dalam menyusun strategi pengembangan sistem pemerintahan digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal lingkup instansi dan metode pendekatan. Fokus penelitian hanya dilakukan pada **satu instansi**, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh OPD di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, pendekatan yang digunakan lebih bersifat kualitatif dan deskriptif, sehingga belum mencakup pengukuran numerik yang lebih rinci terhadap tingkat kesiapan setiap dimensi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk kajian lanjutan terkait kesiapan SPBE di daerah. Studi selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak perangkat daerah guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh, serta menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif agar hasilnya lebih mendalam. Selain itu, menarik pula untuk

mengkaji hubungan antara tingkat kesiapan SPBE dengan tingkat kepuasan pengguna layanan digital, baik dari kalangan internal maupun masyarakat umum.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan kemudahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai dan narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang sangat berarti dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, P., Nurmandi, A., Irawan, B., & Loilatu, M. J. (2022). Research Trends in E-Government Interoperability: Mapping Themes and Concepts Based on The Sco-pus Database. *eJournal of eDemocracy and Open Government*, 14(2), 83–108. <https://doi.org/10.29379/jedem.v14i2.707>
- Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2018). Kesiapan E-Government Pemerintah Daerah Menuju Pengembangan Smart Province (Studi pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 22(2), 185. <https://doi.org/10.31445/jskm.2018.220207>
- Darmi, T. (2016). Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik. *Jurusan Administrasi FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu*, 4(2), 87–156.
- Dionisia Mariani, R., Walliam, D., & Laurensius Say, R. (2020). Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam Penerapan e-Government. *Jurnal Administrasi dan Demokrasi*, 1, 48–56.
- Indrajit, R. E., Zainudin, A., & Rudianto, D. (2004). Electronic government in action. *Yogyakarta: Andi Yogyakarta*, 1–272.
- Iqbal, M., & Fridayani, H. D. (2022). E-Government Acceptance Model During Covid-19 Crisis in Tainan City, Taiwan. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.33701/jtp.v14i1.1861>
- Lundell, B., Gamalielsson, J., Katz, A., & Lindroth, M. (2022). Data Processing and Maintenance in Different Jurisdictions When Using a SaaS Solution in a Public Sector Organisation. *eJournal of eDemocracy and Open Government*, 14(2), 214–234. <https://doi.org/10.29379/jedem.v14i2.749>
- Mariana, D. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan. *CosmoGov*, 1(2), 216. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834>
- Maris, N. A., Agustini, E. P., Megawaty, M., & Oktarina, T. (2023). Analisis Kesiapan Pemerintahan Kota Prabumulih Dalam Implementasi E-Government Menggunakan Metode Technology Readiness Index (TRI). *Journal of Information System Research (JOSH)*, 4(3), 947–952. <https://doi.org/10.47065/josh.v4i3.3263>
- Menpan. (2023). *Luncurkan GovTech Indonesia, Presiden Jokowi tekankan kemudahan birokrasi pelayanan pemerintah*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/luncurkan-govtech-indonesia-presiden-jokowi-tekankan-kemudahan-birokrasi-pelayanan-pemerintah>
- Nangameka, T. I. (2022). Evaluation of E-Government Maturity through the Pillar Approach on the Official Website of the Situbondo Regency Government. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 14(1), 39–56. <https://doi.org/10.33701/jtp.v14i1.2520>

- Nugraha, B. (2020). Implementation of E-Government Policy in Making Smart Governance at Government Communication and Informatics Department, Bandung. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v2i1.46>
- Nugroho, R. A., & Purbokusumo, Y. (2020). E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment for E-Government Application in Indonesia. *Iptek-Kom*, 22(1), 1–17. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.22.1.2020.1-17>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2022). *Rapor pelayanan publik pemerintah daerah se-provinsi Papua Barat*. Ombudsman Republik Indonesia. <https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--rapor-pelayanan-publik-pemerintah-daerah-se-provinsi-papua-barat>
- Reyan M. Zein Hossana Twinomurinz. (2023). *Blockchain Technology in Land Registration: A Systematic Literature Review*. 1–36. <https://doi.org/10.29379/jedem.v15i2.748>
- Shafira, A., & Kurniaswi, A. (2021). Implementasi E-Government dalam upaya peningkatan pelayanan berbasis online di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 52–68.
- Suryatman, H., Wargadinata, E. L., Daerah, P., Sumedang, K., Prabu, J., Agung, G., & Sumedang, N. (2024). *IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC GOVERNMENT IN SUMEDANG REGENCY (A Strategy for Accelerating Electronic-Based Government Systems Towards World Class Regional Government in 2030) PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DIGITAL DI KABUPATEN SUMEDANG (Strategi Percepatan Si*. 50(1), 1–19. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.41386>
- Susanto. (2019). *Smart City : Konsep, Model & Teknologi Bunga Rampai Pengetahuan , Gagasan, & Rekomendasi ITS Untuk Indonesia*.
- Wahyudin. (2023). *IMPLEMENTASI E-OFFICE DALAM PENINGKATAN PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS DI SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2022* Wahyudin. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(1), 1–19.
- Wahyuni, S., Alwi, & Indrayati Nur Indar, N. (2021). Strategi Implementasi Smart Governance di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Program Rindu Capil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil). *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 7(3), 376–397.